

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**LAPORAN KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA  
TRIBUNAN I TAHUN 2023**



**DINAS TENAGA KERJA**

**JL. Veteran No. 53 Telp. (0334) 881546 Lumajang**

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	4
C. Gambaran Umum .....	5
D. Dasar Hukum .....	8
E. Sistematika .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Perencanaan Strategis .....	10
B. Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tribulan I Tahun 2023 .....	16
B. Akuntabilitas Keuangan .....	32
C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

Dinas adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 40 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 29 orang dan Tenaga Kerja Bulanan sebanyak 11 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Bulan Desember tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS dan Tenaga Kerja Bulanan Dinas Tenaga Kerja**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Per bulan Desember Tahun 2022**

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		Struktural		Non Struktural			
		PNS	%	Tenaga Kerja Bulanan	%		
1	Strata 2 (S 2)	5	17.24	-	-	5	12.5
2	Strata 1 (S 1)	10	34.48	6	54,55	16	40
3	Diploma 3	2	6.9	-	-	2	5
4	SLTA/SMK	11	37.93	3	27,27	14	35
5	SLTP			1	9,09	1	2.5
6	SD	1	3.45	1	9,09	2	5
<b>J U M L A H</b>		<b>29</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang berdasarkan Pangkat/Golongan Per bulan Desember tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan**  
**Per bulan Desember Tahun 2022**

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1	<b>Golongan IV</b>	9	0	9
2	<b>Golongan III</b>	12	0	12
3	<b>Golongan II</b>	7	0	7
4	<b>Golongan I</b>	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang terbanyak pada jenjang golongan ruang III sebanyak 12 orang, hal tersebut disamping karena jenjang kepangkatan tersebut adalah jenjang kepangkatan maksimal, hal yang lain adalah tidak terakomodirnya jenjang kepangkatan tersebut pada jenjang jabatan di atasnya.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang**  
**Yang Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan**  
**Per bulan Desember Tahun 2022**

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional II	1
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	13
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dirinci berdasarkan tingkat eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang**  
**Yang menduduki jabatan struktural berdasarkan Tingkat Eselon**  
**Per bulan Desember Tahun 2022**

No.	Tingkat Eselon	Jumlah (orang)
1	II. B	1
2	III. A	1
3	III. B	4
4	IV. A	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Dari tabel 1.4 tersebut diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Struktur Organisasi terdapat 7 Jabatan Struktural dan telah terisi semua.

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang**  
**Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi**  
**Per bulan Desember Tahun 2022**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Mobil	2	2	-	-
2	Sepeda Motor	16	16	-	-
3	Almari Kayu	5	5	-	-
4	Meja Kayu	7	7	-	-
5	Kursi Kayu	76	76		
6	Meja Tamu	3	3	-	-
7	Filing Cabinet	7	7	-	-
8	Komputer	7	7	-	-
9	Laptop	8	8	-	-
10	Kamera	2	1	-	1
11	OHP/LCD	1	1	-	-
12	AC	8	8	-	-
13	Brankas	1	1	-	-
14	Lemari Kaca	14	14	-	-
15	Kursi Putar	21	21	-	-
16	Kursi Besi/Lipat	25	25	-	-
17	Meja Komputer	4	4	-	-
18	Printer	15	15	-	-
19	Almari Arsip Besi	1	1	-	-
	Dan seterusnya sesuai buku inventaris	-	-	-	-

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tribulan I Tahun 2023 adalah sebagai penjabaran Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan aktivitas berdasarkan sub kegiatan-kegiatan-program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tribulan I Tahun 2023 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

### C. GAMBARAN UMUM

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang secara umum dan menjadi kondisi strategis yang dikelola selama kurun waktu Tahun 2022, diantaranya adalah :

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja (>15 <sup>th</sup> ) Jiwa	813.392	818.165	833.668	837.424	840.947
2	Angkatan Kerja (>15 <sup>th</sup> ) Orang	553.923	539.37	557.754	554.318	586.536
3	TPAK (%)	68,10	65,92	66,92	66,19	69,75
4	Penduduk Yang Bekerja (Orang)	539.8	524.189	539.007	534.879	557.378
5	Penganggur Terbuka (Orang)	14.123	15.181	18.747	19.439	29.158
6	TPT (%)	2.55	2,81	3,36	3,51	4,97
7	Jumlah Perusahaan	895	1.432	2.092	2.215	2.241
8	Jumlah Perusahaan yang mempunyai PP	165	171	171	181	188
9	Jumlah Perusahaan yang wajib PP	785	785	785	785	785
10	Jumlah Perusahaan yang mempunyai tata kelola kerja yang layak	609	805	1308	1620	1637
11	Jumlah Perusahaan yang dimonitoring pengupahannya	100	100	100	50	50
14	Jumlah Perusahaan yang diinventarisir WLKP	46	32	28	7	5

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS TENAGA KERJA  
TRIBUNAL I TAHUN 2023**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
16	Jumlah perusahaan yang dibina 5R	50	50	11	15	70
17	Jumlah perusahaan yang meningkatkan produktifitasnya	25	11	9	15	20
19	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	13	13	14	8	16
20	Jumlah kepesertaan BPJS TK	14.972	16.736	20.286	28.617	34.856 (sd okt 2022)
21	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan	28.422	40.29	42.225	57.123	58.195
22	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	2.61	2.06	321	226	847
23	Jumlah Peserta Pelatihan	140	140	140	240	100
24	Jumlah Peserta Uji Kompetensi	0	10	0	0	100
25	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	126	646	0	193	122
26	Jumlah PMI yang difasilitasi	292	277	267	105	45
27	Jumlah Penyuluhan Perlindungan PMI	1 kali (Desa Randuagung)	2 kali (Desa Pagowandan Desa Salak)	0	0	100 orang (anggaran Propinsi, 2 desa Ranuyoso dan Randuagung)
28	Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang ditempatkan melalui padat karya	500	200	1896	0	5210
29	Jumlah LPKS	9	14	16	17	20



No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
30	Jumlah LPKS yang melaporkan realisasi kegiatan pelatihan	5	4	4	5	17
31	Jumlah Transmigran	9 KK	7 KK	nihil	nihil	nihil
		(18 jiwa)	(21 jiwa)			

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh jajaran eselon III, eselon IV dan jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang meliputi :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **D. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2023, dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pada Penjelasan : Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II Pasal 2 bahwa Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

## **E. SISTEMATIKA**

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang menjelaskan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

### **BAB IV: PENUTUP**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Tahun 2018–2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis.

### **VISI KABUPATEN LUMAJANG**

Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yaitu

**“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian mendukung Misi Ke 2 dari keseluruhan Misi Bupati Lumajang Yakni : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Misi tersebut diimplementasikan melalui tujuan Kedua : Menurunnya Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.

### **SASARAN JANGKA MENENGAH**

Untuk mencapai Tujuan yang tertera pada RPJMD tersebut maka ditetapkan sasaran salah satunya adalah :

Meningkatnya Penyerapan dan Partisipasi Angkatan Kerja, dengan Indikator awal sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dari 2 indikator tersebut berproses pada penyesuaian Perubahan RPJMD yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengalami penyederhanaan indikator maka untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang awalnya mempunyai 2 indikator seperti yang disebutkan di atas menjadi mempunyai 1 indikator saja yaitu :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari Sasaran pada P-RPJMD tersebut kemudian ditetapkan menjadi Tujuan Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya akan dilaksanakan secara berkesinambungan sejalan dengan Tujuan yang di tetapkan sebagaimana pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih
		Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif
		Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
		Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar

### **Penetapan Kebijakan**

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program – program.

**Tabel 2.2.**  
**Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan dan Program.**

No.	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN PROGRAM
1	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	Meningkatkan Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif		
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Meningkatkan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial
5	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang pelayanan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan koordinasi dan integrasi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi serta menjalankan konsultasi, mediasi, dan pembinaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

#### **PROGRAM DAN PAGU ANGGARAN**

Program terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan.

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program beserta pagu anggarannya sebagaimana tabel berikut ;

**Tabel 2.3**  
**Program dan Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023**

Program			Anggaran
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	1,736,783,345
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	281,325,500
3	Program Hubungan Industrial	Rp.	115,952,000
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp.	44,309,450
5	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4,069,247,775
JUMLAH		Rp.	6,247,618,070

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Sumber dana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan alokasi anggaran APBD TA. 2023 sebesar Rp. 6,247,618,070.00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :



**Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja  
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang  
Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,736,783,345	DAU & DBHC HT
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%			
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	48%	Program Penempatan Tenaga Kerja	281,325,500	DAU
				Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4,069,247,775	DAU
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	69%	Program Hubungan Industrial	115,952,000	DAU
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	100%	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	44,309,450	DAU
	<b>JUMLAH</b>				<b>6,247,618,070</b>	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dan Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurnya. Komponen yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

#### A. CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

##### a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x \leq 85$	:	Baik
$55 \leq x \leq 70$	:	Cukup Baik
$x \leq 55$	:	Kurang Baik

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja tahun 2023 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2023.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2023.

Pencapaian tujuan “Meningkatnya penyerapan angkatan kerja” dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu realisasi 4,97% masih jauh dari target 2,50% dengan kategori Kurang Baik. Indikator ini menunjukkan semakin rendah nilainya semakin baik, semakin kecil nilainya penyerapan angkatan kerja semakin banyak sehingga pengangguran yang ada semakin berkurang.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 5 indikator sasaran, secara rata-rata adalah sebesar 29,09% dengan kategori Kurang Baik.

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2023, dengan Tujuan Meningkatnya penyerapan Angkatan Kerja direalisasikan melalui sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tribulan I Tahun 2023**

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG	PENYEBUT	TARGET	REALISASI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	TUJUAN : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	29158	586536	2,50%	4,97%
	SASARAN :					
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	0	0	100%	0.00%
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	0	0	100%	0.00%
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	97	134	48%	72,39%
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	1637	2241	69%	73.05%
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0	0	100%	0.00%

*Sumber : Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2022, Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 (data di olah)*

**1. Capaian Kinerja Perbandingan antara Target dan realisasi tahun pelaporan;**

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran dalam kerangka perbandingan antara target dengan realisasi sehingga diperoleh angka capaian kinerja Tribulan I Tahun 2023, sebagaimana Tabel 3.2.

**Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja Target dibanding Realisasi  
Tribulan I Tahun 2023**

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
	TUJUAN :					
A	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,50%	4,97%	1,2%	Kurang baik
	SASARAN :					
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%	0.00%	0.00%	Kurang baik
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%	0.00%	0.00%	Kurang baik
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	48%	72,39%	150,81%	Sangat Baik
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	69%	73,05%	105,87%	Sangat Baik
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	100%	0.00%	0.00%	Kurang baik

Sumber : Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2022, Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 (data di olah)

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa dari keseluruhan indikator terdapat 4 indikator yaitu 1 indikator tujuan dan 3 indikator sasaran. menunjukkan posisi kurang dalam rangkaian upaya pencapaian target p-renstra. Ada 2 Indikator yaitu Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan, dan Persentase Perusahaan yang

menerapkan tata kelola kerja yang layak, dengan capaian berkategori “Sangat Baik”.

**2. Capaian Kinerja Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun lalu;**

**Tabel 3.3  
Pengukuran Kinerja antara Capaian Kinerja Tribulan I Tahun 2023  
dibanding dengan Tahun 2022 dan tahun 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN Tribulan I 2023
1	2	3	4	5
	TUJUAN :			
A	Tingkat Pengangguran Terbuka	83%	19,27%	1,2%
	SASARAN :			
1	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	~	95.00%	0.00%
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%	0%	0.00%
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	286,65%	176.85%	150,81%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	108,49%	107.43%	105,87%
5	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0%	0%	0.00%

*Sumber : Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2022, Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 (data di olah)*

**3. Capaian Kinerja Perbandingan antara capaian kinerja tahun pelaporan dengan Target akhir tahun perencanaan;**

**Tabel 3.4  
Pengukuran Kinerja antara Realisasi Kinerja Tribulan I Tahun 2023 dibanding dengan Akhir Tahun Perencanaan (2023)**

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TRIBULAN I TH. 2023	TARGET TH. 2023
1	2	3	4	5
	TUJUAN :			
A	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,97%	2,50%
	SASARAN :			
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	0.00%	100%
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	0.00%	100%
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	72,39%	48%
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	73.05%	69%
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0.00%	100%

*Sumber : Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2022, Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 (data di olah)*



**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Berdasarkan capaian kinerja Tribulan I Tahun 2023 yang dibandingkan dengan target tahun 2023, diketahui bahwa terdapat 3 indikator yang belum mencapai target. Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **TUJUAN** : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja, dengan Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor kegagalan tercapainya kinerja adalah :

- Kebijakan perusahaan terkait pengurangan tenaga kerja akibat dampak inflasi
- Pengangguran akibat terjadinya bencana alam
- Manajemen ketenagakerjaan daerah belum optimal
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi di bidang ketenagakerjaan
- Terjadinya dinamika regulasi di bidang ketenagakerjaan
- Kurangnya sinergitas multi stakeholders
- Rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di bidang ketenagakerjaan

b. **SASARAN**

Dari kelima capaian indikator sasaran terdapat 3 indikator dengan capaian minus atau nol pada evaluasi tingkat efisiensi. Adapun penjelasan Tabel 3.7 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja yang terlatih dengan capaian kinerja 0% dan capaian anggaran 0,76% sehingga tingkat efisiensi -0,76%. Capaian kinerja tribulan I tahun 2023 0% dikarenakan pelaksanaan kegiatan pelatihan direncanakan pada tribulan II sampai dengan tribulan IV tahun 2023 sesuai dengan time schedule yang telah disusun. Pada Tribulan I tahun 2023 yang dilaksanakan adalah persiapan pelaksanaan pelatihan, mulai dari rapat internal dinas, pembuatan konsep pendaftaran pelatihan secara online dan berkoordinasi dengan BLK Jember.

Indikator ini didukung dengan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 2 kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.699.908.345,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.100.000,00 atau sebesar 0,30%. Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi dari target 160 orang yang lulus uji kompetensi sebanyak 0 orang, sebesar 0%. Pelatihan berbasis kompetensi untuk pencari kerja mulai dilaksanakan pada tribulan II tahun 2023. Dinas Tenaga Kerja melakukan koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Jember untuk memfasilitasi instruktur pelatihan serta sarana (peralatan) yang dibutuhkan selama pelatihan karena Pemerintah Kabupaten Lumajang belum mempunyai BLK sendiri. Pelaksanaan pelatihan anggaran tahun 2023 ini berbasis kluster kompetensi yang dilakukan selama 15 hari termasuk dengan uji kompetensi dan sertifikasi, sebanyak 8 paket pelatihan dengan jumlah peserta 20 orang per paket. Jenis paket pelatihannya yaitu 1 paket Pelatihan Menjahit, 1 paket Pelatihan Otomotif, 1 paket pelatihan kecantikan, 2 paket pelatihan desain grafis dan 3 paket Pelatihan Pengolahan Makanan. Sumber dana pelatihan terbagi atas 2 sumber dana yaitu DAU dan DBHCHT.

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah anggaran untuk Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebesar Rp. 10.575.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.914.000,00 atau 74,84%. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina dari target 20 LPKS terealisasi 8 LPKS atau 40%. Aktivitas yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 2 aktivitas yaitu sosialisasi kepada LPK di Kabupaten Lumajang dan monitoring dan evaluasi LPK.

2. Indikator Persentase Tenaga Kerja yang Produktif dengan capaian kinerja 0% dan capaian anggaran 0% sehingga tingkat efisiensi 0%.

Pencapaian indikator ini didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 2 kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi Rp. 0,00. Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan

Produktivitas target 70 perusahaan dan terealisasi 10 perusahaan. Pelaksanaan kegiatan ini melalui monitoring ke perusahaan sekaligus memberikan konsultasi terkait peningkatan produktifitas di perusahaan serta mengadakan sosialisasi dengan mengundang perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja.

- b. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.300.000,00 dan terealisasi Rp. 0,00. Jumlah perusahaan yang diukur produktivitas tenaga kerjanya dari target 70 perusahaan terealisasi 10 perusahaan, atau sebesar 14,28%.
3. Indikator Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan dengan capaian kinerja sebesar 150,81% dan capaian anggaran 1,21% sehingga tingkat efisiensi 149,60% . Realisasi kinerja didapatkan dari data Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 97 dan Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebesar 134. Capaian kinerja ini didukung oleh Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 3 kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui Program AKL (Antar Kerja Lokal) dengan target 110 orang dan realisasi 4 orang yang berasal dari hasil fasilitasi rekrutmen oleh BPRS Karya Mega Sentosa atau tercapai 3,64 % dimana capaian kinerja tersebut tanpa didukung anggaran kegiatan dan kecilnya capaian kinerja ini dikarenakan pada umumnya Perusahaan Swasta dan BUMD belum sepenuhnya mau melaporkan lowongan dan penyerapan tenaga kerja termasuk Penyandang Disabilitas, sedangkan Realisasi Anggaran Kegiatan Pelayanan Antar Kerjadi Daerah Kabupaten/Kota yaitu untuk pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan terealisasi sebesar Rp. 3.400.000,00 atau sebesar 6,30 % sehingga apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja -2,66 %. Pada Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan Pelayanan Antar Kerja dimana sampai dengan Tribulan I Tahun 2023 belum bisa dilaksanakan karena ada pergeseran anggaran kas kecuali Upah Tenaga Kerja Bulanan yang sudah terserap 2 (dua) bulan yaitu bulan Februari dan Maret 2023.

Setiap tahun terdapat beberapa Program Perluasan Kesempatan Kerja dengan harapan dapat membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Lumajang yang alokasi anggarannya dari Kementerian Tenaga Kerja melalui dana APBN dengan prosedur pengajuan proposal untuk diupload melalui aplikasi Bizhub diantaranya :

- Padat Karya yaitu menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula bertujuan untuk dapat mengakomodir masyarakat pencari kerja yang ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi;
- Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan merupakan tenaga kerja mandiri yang pernah mendapatkan program perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja;

Sampai dengan Tribulan I Tahun 2023 belum ada rapat koordinasi yang membahas hal-hal tersebut.

b. Pengelolaan informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Data Pasar Kerja. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 182.244.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Realisasi Kinerja dari target 6 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga realisasi capaian kinerjanya mencapai 16,67 % sedangkan untuk target pencari kerja ditempatkan melalui Job Fair sejumlah 500 orang belum ada realisasi, sehingga capaian kinerjanya 0 % dimana sampai dengan Tribulan I Tahun 2023 belum bisa dilaksanakan karena ada pergeseran anggaran kas dan pelaksanaan Job Fair setiap tahunnya menunggu pelaksanaan Job Fair Provinsi yang biasanya dilaksanakan setelah Bulan Tenaga Kerja yaitu Bulan September.

Kendala dari kegiatan Job Fair sampai saat ini adalah banyak pencari kerja yang melamar pekerjaan dan ketika dipanggil perusahaan tidak hadir dan bersifat coba-coba.

c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi dengan target kinerja satu tahun sejumlah 200 orang terealisasi sampai dengan Tribulan I Tahun 2023 sejumlah 93 orang atau dengan capaian kinerja sebesar 46,50 % yang terdiri dari 86 orang CPMI yang difasilitasi penerbitan ID CPMI dan Rekom Paspor serta 7 orang Pekerja Migran (PMI) yang dipulangkan dalam kondisi meninggal dan deportasi. Pada Kegiatan ini hanya ada 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan pagu anggaran Rp. 45.126.000,00 dan sampai dengan Tribulan I Tahun 2023 belum bisa dilaksanakan karena terjadi pergeseran anggaran kas.

Namun demikian pada kenyataannya apabila diperbandingkan CPMI legal sangat kecil dibanding dengan yang ilegal hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap resiko untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang aman dan masyarakat cenderung menempuh jalur non prosedural.

Kondisi yang terjadi saat ini dimana dengan adanya perubahan aplikasi dalam penerbitan ID CPMI dan Rekom Paspor yang semula menggunakan SISKOTKLN dan sekarang menggunakan SIAPKerja dan SISKOP2MI dimana sampai dengan saat ini masih belum ada sinkronisasi antara aturan dan system yang digunakan sehingga masih ada kendala dalam mengaplikasikan sistem tersebut.

Disamping itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu :

- Melakukan sosialisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia di daerah kantong PMI Ilegal dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas dalam kota, karena banyak sekali PMI Ilegal dibandingkan dengan PMI Legal hal ini dikarenakan kurang adanya pemahaman terhadap masyarakat sisi positif dan negatifnya ketika menjadi PMI di Luar Negeri, dan masyarakat hanya berfikir pendek bagaimana bisa segera berangkat dengan janji-janji manis dari para Tekong karena kalau menjadi PMI Legal masih harus melalui beberapa prosedur yang harus dilalui.

- Melakukan pembinaan dan monitoring ke Desa Migran Produktif yang merupakan desa kantong PMI Ilegal yang mendapatkan bantuan program dari Kementerian Tenaga Kerja bagi PMI Purna dengan harapan bisa menjadi kepanjangan tangan untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk menjadi PMI yang berangkat secara prosedural.
4. Indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan capaian kinerja sebesar 105,87% dan capaian anggaran 4,99% sehingga tingkat efisiensi 100,88%. Realisasi didapatkan dari data Jumlah Perusahaan yang mempunyai PP/PKB/ LKS Bipartit/ Struktur Skala Upah/ terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1.637 dan data Jumlah Perusahaan di Kabupaten Lumajang sebesar 2.241. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sebagai berikut :
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.  
Jumlah pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tahun 2023 dengan target 15 dokumen sampai dengan tribulan I tahun 2023 terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 13,33%.
  - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.  
Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi target tahun 2023 sebanyak 13 perkara, sampai dengan tribulan I tahun 2023 terealisasi 5 perkara atau 38,46%.
5. Indikator Persentase penempatan transmigran sesuai standar dengan capaian kinerja 0% dan capaian anggaran 0% sehingga tingkat efisiensi 0%.  
Kinerja ini didukung oleh Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah KK Transmigran ditempatkan dengan target 2 KK dan terealisasi 0 KK. Capaian kinerja 0% dikarenakan ketentuan kuota pemberangkatan transmigran oleh pemerintah pusat dan propinsi. Sampai dengan akhir tribulan I tahun 2023 belum ada informasi terkait hal tersebut dan adanya rencana pergeseran anggaran.

**1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan anggaran yang cukup pada tahun 2023. Efisiensi atas capaian setiap sasaran dan anggaran pada Tribulan I tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja Anggaran Tribulan I Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%	0.00%	0.00	1,710,483,345	13,014,000	0.76	-0.76
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%	0.00%	0.00	26,300,000	0	0.00	0.00
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	48%	72,39%	150.81	281,325,500	3,400,000	1.21	149.60
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	69%	73.05%	105.87	115,952,000	5,790,000	4.99	100.88



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	100%	0.00%	0.00	44,309,450	0.00	0.00	0.00

Dari tabel tersebut diatas, dari lima sasaran terdapat tiga sasaran yang tidak efisien dan dua sasaran menunjukkan efisien dengan efisiensi tertinggi pada sasaran Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Capaian kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.247.618.070,00 dan realisasi total belanja daerah sebesar Rp. 723.191.342,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas 5 program pada tribulan I tahun 2023 sebesar 11,58%.

Prinsip dasar penetapan alokasi anggaran adalah kesesuaian antara prioritas pembangunan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja terhadap masing-masing sasaran :

**Tabel 3.6**  
**Persentase Alokasi Anggaran Belanja Daerah Tribulan I Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PAGU (Rp)</b>	<b>SERAPAN (Rp)</b>	<b>SERAPAN (%)</b>
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	1,710,483,345	13,014,000	0.76
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	26,300,000	0	0.00
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	281,325,500	3,400,000	1.21
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	115,952,000	5,790,000	4.99

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	SERAPAN (Rp)	SERAPAN (%)
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	44,309,450	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>			<b>2,178,370,295</b>	<b>22,204,000</b>	<b>1.02</b>
<b>Persentase Alokasi Anggaran Program Pendukung</b>					
NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	SERAPAN	SERAPAN (%)
			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	4,069,247,775	700,987,342	17.23
<b>Total Pagu Anggaran</b>			<b>6,247,618,070</b>	<b>723,191,342</b>	<b>11.58</b>

**1. Persentase capaian Kinerja Keuangan antara Target dengan Realisasi Anggaran**

**Tabel 3.7  
Persentase capaian Kinerja Keuangan antara Target dengan Realisasi Anggaran Tribulan I Tahun 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dilatih	100%	0%	0%	1,736,783,345	13,014,000	0.75	DAU & DBHCHT
		Persentase Peningkatan Produktifitas Perusahaan	100%	0%	0%				
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	160 orang	0 orang	0%	1,699,908,345	5,100,000	0.30	DAU & DBHCHT
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 orang	0 orang	0%	1,699,908,345	5,100,000	0.30	DAU & DBHCHT

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBUNAL I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina</b>	100%	40.00%	40.00%	<b>10,575,000</b>	<b>7,914,000</b>	<b>74.84</b>	<b>DAU</b>
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	8 Lembaga	40.00%	10,575,000	7,914,000	74.84	DAU
	<b>Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</b>	<b>Persentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi</b>	<b>100%</b>	<b>14,28%</b>	<b>14,28%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DAU</b>
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	70 perusahaan	10 perusahaan	14,28%	20,000,000	0.00	0.00	DAU
	<b>Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang diukur produktifitas tenaganya</b>	<b>70 perusahaan</b>	<b>10 perusahaan</b>	<b>14,28%</b>	<b>6,300,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DAU</b>

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 dokumen	0 dokumen	0%	6,300,000	0.00	0.00	DAU
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase pencari kerja yang ditempatkan</b>	<b>48%</b>	<b>69,40%</b>	<b>144,58%</b>	<b>281,325,500</b>	<b>3,400,000</b>	<b>1.21</b>	<b>DAU</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL</b>	<b>110 orang</b>	<b>4 orang</b>	<b>3,64%</b>	<b>53,955,500</b>	<b>3,400,000</b>	<b>6.30</b>	<b>DAU</b>
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	100 orang	4 orang	4%	19,755,500	0.00	0.00	DAU
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 orang	0 orang	0%	34,200,000	3,400,000	9.94	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data pasar kerja yang dikelola	6 dokumen	1 dokumen	16,67%	182,244,000	0.00	0.00	DAU
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui <i>Job Fair / Bursa Kerja</i>	500 orang	0 orang	0%	182,244,000	0.00	0.00	DAU
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi	200 orang	93 orang	46,5%	45,126,000	0.00	0.00	DAU
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5 orang	0 orang	0%	45,126,000	0.00	0.00	DAU
III	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang mempunyai PP</b>	<b>24%</b>	<b>23.95%</b>	<b>99.79%</b>	<b>115,952,000</b>	<b>5,790,000</b>	<b>4.99</b>	<b>DAU</b>

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan	15 dokumen	2 dokumen	13,33%	74,009,000	5,100,000	6.89	DAU
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 perusahaan	2 perusahaan	13,33%	15,000,000	0.00	0.00	DAU
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 perusahaan	0 perusahaan	0.00%	15,000,000	0.00	0.00	DAU



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 laporan	1 laporan	16,67%	44,009,000	5,100,000	11.59	DAU
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi</b>	<b>13 perkara</b>	<b>5 perkara</b>	<b>38,46%</b>	<b>41,943,000</b>	<b>690,000</b>	<b>1.65</b>	<b>DAU</b>
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 perkara	0 perkara	0.00%	32,868,000	690,000	2.10	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 perkara	5 perkara	50.00%	3,375,000	0.00	0.00	DAU
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 asosiasi dan 80 SP/SB	0	0.00%	3,000,000	0.00	0.00	DAU
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	0 Lembaga	0.00%	2,700,000	0.00	0.00	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase transmigran terlatih yang ditempatkan</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>44,309,450</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DAU</b>
	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KK Transmigran ditempatkan</b>	<b>2 KK</b>	<b>0 KK</b>	<b>0%</b>	<b>44,309,450</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DAU</b>
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2 KK	0 KK	0%	12,564,750	0.00	0.00	DAU
	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	20 orang	0 orang	0%	9,017,700	0.00	0.00	DAU
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 lokasi	0 lokasi	0%	22,727,000	0.00	0.00	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	17,23%	17,23%	4,069,247,775	700,987,342	17.23	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	25%	25%	3,525,669,633	632,699,431	17.95	DAU
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/12 bulan	29 orang/3 bulan	25%	3,476,453,633	625,079,431	17.98	DAU
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	3 dokumen	25%	49,216,000	7,620,000	15.48	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	3,43%	3,43%	174,801,142	5,997,000	3.43	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	0%	5,885,800	0.00	0.00	DAU
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	0 paket	0%	52,149,627	0.00	0.00	DAU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	0 paket	0%	21,125,715	0.00	0.00	DAU
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	0 dokumen	0%	1,500,000	0.00	0.00	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1 laporan	8,33%	94,140,000	5,997,000	6.37	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	25%	25%	282,732,000	60,221,021	21.30	DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25%	87,864,000	11,846,655	13.48	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25%	194,868,000	48,374,366	24.82	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25%	25%	86,045,000	2,069,890	2.41	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TRIBULAN I TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	2 unit	10%	44,595,000	2,069,890	4.64	DAU
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 unit	0 unit	0%	31,450,000	0.00	0.00	DAU
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0 unit	0%	10,000,000	0.00	0.00	DAU
	<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>					<b>6,247,618,070</b>	<b>723,191,342</b>	<b>11.58</b>	

### **C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang diperoleh melalui penilaian kinerja selama kurun waktu Tribulan I Tahun 2023, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya rencana kebijakan Self Blocking anggaran tahun 2023, sehingga semua pelaksanaan program kegiatan dinas ditunda;
- b. Adanya perubahan aplikasi dalam penerbitan ID CPMI dan Rekom Paspor yang semula menggunakan SISKOTKLN dan sekarang menggunakan SIAPKerja dan SISKOP2MI dimana sampai dengan saat ini masih belum ada sinkronisasi antara aturan dan system yang digunakan;
- c. Masih sering terjadi penyempurnaan/perbaikan sistem administrasi baik keuangan dan sebagainya terkait perubahan peraturan perundang-undangan, hal tersebut cukup menghambat pelaksanaan tugas;
- d. Keterbatasan jumlah personil serta kompetensinya melaksanakan jabatan fungsional, sarana dan prasarana serta anggaran sudah pasti mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak maksimal;
- e. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan (dalam pelaksanaan semua kegiatan terutama terkait pelatihan kompetensi yang bersumber dana DAU);
- f. Pemerintah Daerah belum memiliki BLK, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang belum terakreditasi, menyebabkan kesulitan melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi yang terstandart;
- g. Luncuran dari Kementerian Tenaga Kerja terkait pendirian BLK Komunitas di beberapa Pondok Pesantren yang tidak melalui Dinas Tenaga Kerja kabupaten;
- h. Belum ada turunan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yaitu berupa Peraturan Bupati Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Bupati Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA);
- i. Masih rendahnya pembinaan dan perlindungan terhadap PMI;
- j. Pemberangkatan serta penempatan calon transmigran menyesuaikan dengan jadwal dari propinsi dan pusat serta kesiapan daerah tujuan transmigrasi;
- k. Belum optimalnya sistem pengelolaan data base tenaga kerja daerah;



- I. Perusahaan enggan memberikan data riil baik terkait jumlah tenaganya, hasil produksinya, modal awal dan laba perusahaan, termasuk kewajiban dalam mengisi aplikasi WLKP.

Dari permasalahan yang dihadapi maka diambil langkah- langkah strategi dan kebijakan pemecahan masalah sebagai berikut :

- a. Menyusun skala prioritas program dan kegiatan serta melakukan breakdown penyesuaian pagu anggaran dan kinerja untuk masing-masing sub kegiatan;
- b. Menunjuk petugas/operator SIAPKerja dan SISKOP2MI yang kompeten dan melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Tenaga Kerja Propinsi maupun Kementerian terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam aplikasi SIAPKerja dan SISKOP2MI;
- c. Untuk menyelesaikan semua beban tugas dilakukan dengan cara memaksimalkan personil yang ada, merencanakan pemberangkatan pelatihan kompetensi Jabatan Fungsional;
- d. Melakukan advokasi terkait Pelatihan dengan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) serta dinas pendidikan yang membawahi SMK/SMA serta Kementerian Agama yang membawahi Pondok Pesantren atau Madrasah;
- e. Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Bupati Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) ;
- f. Melakukan sinergitas program dimulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, LSM, OPD, Pemerintahan Desa terkait serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ;
- g. Melakukan sosialisasi ke Perusahaan terkait pentingnya pengukuran produktivitas tenaga kerja, pentingnya memberikan data lowongan serta memberikan data riil jumlah karyawan serta mengikuti norma yang berlaku terkait kesejahteraan pekerja serta hubungan Industrial. Dan melakukan sinergitas dengan OPD terkait;
- h. Melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif dengan antar lembaga baik horizontal maupun vertikal ;
- i. Melakukan koordinasi secara aktif dengan propinsi maupun pusat terkait penempatan calon transmigran serta kesiapan daerah tujuan transmigrasi;
- j. Optimalisasi aplikasi SIMNAKER yang perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan aplikasi Kementerian Tenaga Kerja yaitu SISNAKER guna memperbaiki data ketenagakerjaan.

**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribunal I Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Indikator Kinerja Tribunal I Tahun 2023 dapat disimpulkan dengan hasil baik, namun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama Tribunal I Tahun 2023 masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribunal I Tahun 2023 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang,           Maret 2023



